

## **SKRIPSI**

# **EFEKTIVITAS PENYALURAN FASILITAS MENJAHIT PADA KELOMPOK JAHIT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA BANDA ACEH**



**Disusun Oleh:**

**STESIA  
NIM. 150604054**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Stesia

NIM : 150604054

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

Banda Aceh, 7 Juli 2022

A R - R A N I R Y

Yang Menyatakan



Stesia

## PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### Efektivitas Penyaluran Fasilitas Menjahit Pada Kelompok Jahit Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Banda Aceh

Disusun Oleh:

Stesia  
NIM. 150604054

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si.  
NIP. 197204281999031005

A. Rahmat Adj, SE., M.Si  
NIDN. 2025027902

Mengetahui,  
Ketua Prodi,

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si  
NIP. 197204281999031005

## PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### Efektivitas Penyaluran Fasilitas Menjahit Pada Kelompok Jahit Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Banda Aceh

Stesia

NIM: 150604054

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ilmu  
Ekonomi

Pada Hari/Tanggal:

Rabu,

23 Juli 2022 M

24 Dzulhijjah 1444 H

Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si.  
NIP. 197204281999031005

A. Rahmat Adi, S.E., M.Si.  
NIDN. 2025027902

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Idaryani, SE., M.Si  
NIDN. 0105057503

Jalilah, S.H.I., M.Ag.  
NIDN. 2008068803

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec  
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Stesia  
Nim : 150604054  
Fakultas/Program Studi : FEBI  
Prodi : Studi Ilmu Ekonomi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh, hak bebas royalti non-esklusif (*non-executif royalty-free right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐ .....

Yang berjudul: "*Efektivitas Penyaluran Fasilitas Menjahit Pada Kelompok Jahit Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Banda Aceh*".

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak bebas Royalti ini, UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, Mengalih media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mengaplikasikannya di internet atas media lain.

Secara *fulltex* untuk kepentingan akademik tidak perlu meminta izin dari saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atas penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh akan bebas dari segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 7 Juli 2022

Mengetahui,

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Stesia

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si.

A. Rahmat Adi, SE., M.Si

NIM: 150604054

NIP. 197204281999031005

NIDN. 2025027902

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat, dan karunia serta kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis panjatkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, keluarga serta para sahabat beliau sekalian, yang menuntun kita dari alam kegelapan pada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan agar memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dengan judul Efektivitas Penyaluran Fasilitas Menjahit pada Kelompok Jahit dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Banda Aceh".

Dalam menyelesaikan karya ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, selaku Dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si yaitu Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi;
3. Muhammad Arifin, Ph.D, yaitu Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;

- 
- The logo of UIN Ar-Raniry is a green shield-shaped emblem. In the center is a white minaret with a yellow crescent and star above it. The letters 'UIN' are written in large yellow font across the minaret. Below the minaret, the Arabic text 'جامعة الرانيري' (UIN Ar-Raniry) is written in yellow. At the bottom of the shield, the text 'AR-RANIRY' is written in yellow.
4. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si, yaitu Pembimbing I, yang memberi masukan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
  5. A. Rahmat Adi, SE., M.Si yaitu Pembimbing II yang telah memberi masukan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
  6. Ayahanda tercinta dan Ibu tersayang, serta suami dan anak juga turut serta keluarga besar;
  7. Sahabat seperjuangan pada Prodi Ilmu Ekonomi, yang secara bersama menempuh studi yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungannya selama ini.
  8. Seluruh pihak yang telah tulus ikhlas membantu, memberikan doa dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Bantuan tersebut peneliti serahkan kepada Allah Swt untuk memberi balasan dan pahala yang lebih baik.
- Akhirnya, penulis mengemukakan bahwa atas bantuan semua pihak tersebut dapat diberi ganjaran dan pahala yang setimpal oleh Allah SWT. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 7 Juli 2022  
Penulis

Stesia

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

### 1. Konsonan

| No | Arab | Latin              | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
| 1  | ا    | Tidak dilambangkan | 16 | ط    | T     |
| 2  | ب    | B                  | 17 | ظ    | Z̤    |
| 3  | ت    | T                  | 18 | ع    | ‘     |
| 4  | ث    | Ṣ                  | 19 | غ    | G     |
| 5  | ج    | J                  | 20 | ف    | F     |
| 6  | ح    | H                  | 21 | ق    | Q     |
| 7  | خ    | Kh                 | 22 | ك    | K     |
| 8  | د    | D                  | 23 | ل    | L     |
| 9  | ذ    | Z̤                 | 24 | م    | M     |
| 10 | ر    | R                  | 25 | ن    | N     |
| 11 | ز    | Z                  | 26 | و    | W     |
| 12 | س    | S                  | 27 | ه    | H     |
| 13 | ش    | Sy                 | 28 | ء    | ’     |
| 14 | ص    | Ṣ                  | 29 | ي    | Y     |
| 15 | ض    | Ḍ                  |    |      |       |

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin |
|-------|--------|-------------|
| ◌َ    | Fathah | A           |
| ◌ِ    | Kasrah | I           |
| ◌ُ    | Dammah | U           |

### b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama           | Gabungan Huruf |
|-----------------|----------------|----------------|
| يَ              | Fathah dan ya  | Ai             |
| وَ A R          | Fathah dan wau | Au             |

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama           | Huruf dan Tanda |
|------------------|----------------|-----------------|
| أَ               | Fathah dan ya  | Ā               |
| يَ               | Fathah dan wau | Ī               |
| يُ               | Dammah dan wau | Ū               |

Contoh:

qala: قَالَ  
 rama: رَمَى  
 qila: قِيلَ  
 yaqulu: يَقُولُ

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*raudah al-atfal/raudatul atfal* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ  
*al-madinah al-munawwarah/* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ  
*al-madinatul munawwarah*  
*talhah* : طَلْحَةُ

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## ABSTRAK

Nama/NIM : Stesia/150604054  
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi  
Judul : Efektivitas Penyaluran Fasilitas Menjahit pada Kelompok Jahit dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Banda Aceh  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si  
Pembimbing II : A. Rahmat Adi, SE., M.Si

Usaha industri konveksi atau kelompok menjahit merupakan salah satu usaha yang cukup berkembang di Kota Banda Aceh. Untuk itu Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja telah memberikan bantuan terhadap kelompok jahit. Hanya saja, perlu ada upaya yang matang dalam melaksanakan program penyaluran fasilitas jahit agar dapat diaslurkan secara tepat sasaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Pemerintah Banda Aceh menyalurkan fasilitas menjahit pada kelompok jahit di dalam pemberdayaan masyarakat, untuk menganalisis dampak penyaluran fasilitas tersebut, dan untuk mengetahui efektivitas penyaluran fasilitas menjahit. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *deskriptif*. Data penelitian ini terdiri dari wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Kota Banda Aceh dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu: menyerahkan fasilitas mesin jahit, pengawasan, dan pelatihan. Dampak penyaluran fasilitas jahit adalah positif, yaitu membantu kelompok jahit yang mempunyai keterbatasan atau kerusakan mesin, dan terbukanya lapangan kerja. Penyaluran fasilitas menjahit kepada kelompok jahit di Kota Banda Aceh belum efektif, karena ada dua indikator yang belum dipenuhi yaitu ketepatan sasaran dan sosiialisasi perogram yang belum dapat dipenuhi. Adapun dua indikator yang lainnya sudah terpenuhi yaitu tujuan program dan proses pemantauan dan pengawasan program.

**Kata Kunci :** *Efektivitas, Penyaluran, Fasilitas Menjahit, Pemberdayaan*

## DAFTAR ISI

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>            | <b>iii</b>    |
| <b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....</b>       | <b>iv</b>     |
| <b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>       | <b>v</b>      |
| <b>FROM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....</b>        | <b>vi</b>     |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                             | <b>vii</b>    |
| <b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...</b>       | <b>ix</b>     |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                     | <b>xiii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                  | <b>xiv</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                | <b>xvi</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                              | <b>xvii</b>   |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                      | <br><b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang Masalah.....                         | 1             |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                                | 5             |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                              | 5             |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....                             | 6             |
| 1.5 Sistematika Pembahasan .....                        | 7             |
| <br><b>BAB II LANDASAN TEORETIS.....</b>                | <br><b>9</b>  |
| 2.1 Teori Efektivitas.....                              | 9             |
| 2.2 Usaha Menjahit dan Faktor Pendukungnya.....         | 18            |
| 2.3 Penelitian Terkait.....                             | 23            |
| 2.4 Kerangka Penelitian.....                            | 26            |
| <br><b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>               | <br><b>27</b> |
| 3.1 Jenis Penelitian.....                               | 27            |
| 3.2 Subjek dan Objek Penelitian .....                   | 27            |
| 3.3 Data dan Teknik Pemerolehannya.....                 | 28            |
| 3.3.1 Data primer .....                                 | 28            |
| 3.3.2 Data sekunder.....                                | 30            |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data .....                       | 30            |
| 3.4.1 Studi Dokumentasi.....                            | 32            |
| 3.5 Metode Analisis Data .....                          | 33            |
| <br><b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b> | <br><b>35</b> |
| 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....               | 35            |

|                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2 Peran dari Pemerintah Banda Aceh Menyalurkan Fasilitas Menjahit ke Kelompok Jahit dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat..... | 40        |
| 4.3 Dampak Penyaluran Fasilitas Menjahit kepada Kelompok Jahit di Kota Banda Aceh .....                                        | 49        |
| 4.4 Efektivitas Penyaluran Fasilitas Menjahit di dalam Kaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat di Banda Aceh.....                | 51        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                     | <b>56</b> |
| 5.1 Kesimpulan.....                                                                                                            | 56        |
| 5.2 Saran.....                                                                                                                 | 57        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                    | <b>58</b> |



## DAFTAR TABEL

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan .....                      | 23 |
| Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan, Mukim dan Gampong di Kota Banda Aceh ..... | 36 |



## DAFTAR GAMBAR

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Berfikir ..... | 26 |
|------------------------------------|----|



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Masyarakat secara prinsip tidak bisa dipisahkan dari aktivitas bekerja bahkan seseorang bisa saja melakukan dua pekerjaan ganda secara sekaligus untuk tujuan memenuhi tuntutan kebutuhan sehari-hari, nafkah, dan kebutuhan yang lain. Upaya memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membuka usaha mandiri, atau bersinergi di antara kelompok kerja di dalam suatu masyarakat dengan pemerintah setempat. Salah satu di antara usaha yang cukup marak digeluti oleh masyarakat adalah usaha menjahit atau konveksi.

Usaha menjahit atau konveksi cenderung mampu bertahan di tengah situasi ekonomi memburuk sekalipun. Hal ini dipengaruhi karena usaha menjahit berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan pokok manusia, berupapakaian. Usaha menjahit ini menjadi satu di antara jenis bisnis yang menjanjikan. Sepanjang manusia memakai pakaian, dan model pakaian yang terus berganti, maka bisnis usaha menjahit tetap mampu eksis dalam setiap keadaan (Jubilee, 2010). Oleh karena itu, tidak sedikit masyarakat memilih mengembangkan usaha di bidang bisnis menjahit.

Pengembangan usaha menjahit bisa dilakukan dengan ragam bentuk, misalnya melaksanakan program pelatihan kerja menjahit, memberikan sertifikat pelatihan, selanjutnya membentuk kelompok

menjahit kepada masyarakat yang sudah pernah mengikuti program pelatihan. Upaya-upaya tersebut dapat memberikan dampak positif bukan hanya kepada pelaku usaha menjahit dalam meningkatkan dan menumbuhkan ekonomi keluarga, juga berdampak positif bagi orang lain melalui upaya membuka lapangan kerja.

Sebagai pilihan tepat dalam pengembangan usaha di tengah-tengah masyarakat, usaha menjahit memerlukan modal yang relatif tidak sedikit, mulai tempat, fasilitas menjahit yang terdiri dari alat dan mesin jahit bahkan keahlian (*skill*) dan juga promosi terhadap konsumen. Namun begitu, jika dibandingkan antara modal dan *skill* maka peluang usaha jasa jahit termasuk salah satu usaha yang tidak membutuhkan modal besar, namun begitu syarat utamanya adalah memerlukan *skill* atau kemampuan menjahit (Aryani, 2013). Semua komponen tersebut menjadi bagian penting yang harus dipenuhi di dalam upaya pengembangan usaha menjahit.

Fasilitas menjahit menjadi bagian vital ketika seseorang atau kelompok dalam memilih mengembangkan usaha menjahit. Namun begitu, pemenuhan fasilitas jahit, yang terdiri dari alat serta mesin jahit terkadang mengalami kendala atau sekurang-kurangnya modal untuk mengadakan fasilitas tersebut masih sangat kurang, sehingga perlu ada intervensi dari dinas terkait di dalam memberikan modal dan penyaluran fasilitas menjahit yang dibutuhkan masyarakat.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Banda Aceh berposisi yang pemerintah kota merupakan salah satu lembaga yang bergerak bidang pengembangan usaha dan bisnis di Kota Banda Aceh. Dinas

Tenaga Kerja Banda Aceh sudah melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan usaha menjahit, mulai dari pelaksanaan program pelatihan pemberian modal yang berbentuk uang, dan dana bantuan sosial, hingga menyalurkan berbagai fasilitas menjahit.

Menyangkut penyaluran fasilitas menjahit tersebut, Disnaker Kota Banda Aceh telah menyalurkan fasilitas menjahit tersebut ke beberapa kelompok jahit di Kecamatan Meuraxa, di antaranya ialah Kelompok Usaha Bagus Jahit Gampong (Desa) Deah Baro, serta Kelompok Meusanut Jahit di Gampong Lampaseh Kota (Fitriana, 2021: Wawancara).

Motivasi adanya program penyaluran fasilitas menjahit yang berbentuk alat dan juga mesin menjahit tersebut didedikasikan agar usaha di bidang konveksi atau menjahit dapat berkembang menjadi lebih baik dan besar. Tujuan akhirnya adalah penyelenggaraan atas pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi kelompok jahit di Kota Banda Aceh. Tidak kalah pentingnya, penyaluran tersebut agar bisa membuka peluang kerja dan mengurangi pengangguran masyarakat yang memiliki kemampuan menjahit.

Namun begitu, sejauh observasi penulis, dan hasil *interview* awal yang dilakukan kepada kelompok usaha jahit tersebut, bahwa penyaluran fasilitas menjahit bagi kelompok jahit di Kota Banda Aceh mengalami kendala, terutama akibat dampak pandemi Corona Virus Disease yang terjadi semenjak akhir tahun 2019 (Covid-19). Kendala tersebut di antaranya berkurangnya anggaran pemerintah, terutama Dinas Tenaga Kerja dalam penyaluran fasilitas menjahit.

Kendala lainnya adalah penyaluran fasilitas tersebut juga ditengarai belum tepat sasaran. Masyarakat yang memiliki keahlian menjahit relatif masih terbatas dalam hal fasilitas sementara bantuan fasilitas dari pemerintah tidak ada (Nuraini, Wawancara, 2022). Untuk itu, penyaluran fasilitas menjahit bagi kelompok jahit di Kota Banda Aceh cenderung belum efektif, khususnya di dalam pemberdayaan masyarakat, misalnya peluang membuka lapangan kerja dan juga mengurangi pengangguran. Penyaluran fasilitas menjahit tersebut tidak dilakukan secara merata, di samping masih banyak usaha jahit yang semestinya mendapat fasilitas alat atau mesin menjahit namun tidak mendapat bantuan.

Keterangan di atas juga didukung dengan beberapa penelitian terdahulu. Di antaranya temuan penelitian Saputra (2022), bahwa pemberdayaan usaha konveksi di dalam bentuk penyaluran fasilitas menjahit, khususnya Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat belum efektif, dan belum mampu membuka lapangan kerja terhadap orang yang memiliki *skill* di bidang menjahit.

Namun demikian, dalam beberapa penelitian terdahulu, pada subjek kajian dan tempat penelitian yang berbeda, justru ditemukan bahwa penyaluran fasilitas menjahit dinilai telah efektif. Di antara penelitian tersebut adalah oleh Sa'adah (2020), bahwa penyaluran fasilitas menjahit dinilai sudah efektif, khususnya di dalam upaya meningkatkan penghasilan pengusaha jahit.

Terhadap dua penelitian tersebut, maka penyaluran fasilitas menjahit oleh dinas terkait sebetulnya belum bisa dipastikan efektif

di lapangan. Untuk itu, dalam penelitian ini hendak mengemukakan dan menganalisis efektivitas penyaluran fasilitas jahit ke kelompok jahit yang ada di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.

Berdasarkan uraian tersebut, maka menarik untuk dikaji dan diteliti lebih jauh tentang efektivitas penyaluran fasilitas menjahit dalam membuka lapangan kerja di Kecamatan Meuraxa, berjudul: **Efektivitas Penyaluran fasilitas Menjahit pada Kelompok Jahit dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Banda Aceh.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Pemerintah Banda Aceh menyalurkan fasilitas menjahit pada kelompok jahit dalam pemberdayaan masyarakat?
2. Bagaimana dampak penyaluran fasilitas menjahit bagi kelompok jahit dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimanakah efektivitas penyaluran fasilitas menjahit kepada kelompok jahit dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Banda Aceh?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitiannya yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Pemerintah Banda Aceh menyalurkan fasilitas menjahit pada kelompok jahit dalam pemberdayaan masyarakat.

2. Untuk mengetahui dampak penyaluran fasilitas menjahit bagi kelompok jahit dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Banda Aceh.
3. Untuk menganalisis efektivitas penyaluran fasilitas menjahit pada kelompok jahit dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Banda Aceh.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih atas temuan penelitian, baik kepada peneliti-peneliti berikutnya, kepada masyarakat dan pihak-pihak relevan dengan hasil penelitian. Untuk itu, manfaat penelitian ini dapat dikemukakan berikut ini:

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsih pengetahuan kepada masyarakat, terutama terhadap pihak-pihak terkait yang secara langsung berhubungan langsung dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini dapat dijadikan satu referensi dan tambahan informasi terhadap penyaluran fasilitas menjahit yang dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk itu, dengan adanya hasil penelitian ini, kekurangan-kekurangan dan kendala serta hambatan yang selama ini ditemukan di lapangan agar bisa di minimalisir ke depan, bisa dibenahi sesuai rekomendasi yang dikemukakan dalam penelitian ini.
2. Secara akademis, hasil penelitian ini menjadi bahan penelitian di dalam meneliti penyaluran fasilitas menjahit yang dilaksanakan oleh pemerintah. Bagi peneliti-peneliti berikutnya, hasil temuan

dalam penelitian ini dapat dijadikan rujukan di dalam penelitian lanjutan, serta menemukan masalah-masalah baru yang memiliki hubungan dengan penyaluran fasilitas menjahit khususnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Di samping itu hasil penelitian ini juga diharapkan menambah kahazanah Ilmu di Bidang Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

### 1.5 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematis mengikuti pedoman penulisan skripsi. Dalam penulisan skripsi ini, disusun dengan pola tersendiri yang terdiri lima bab, masing-masing bab dijelaskan pada beberapa sub bahasan tertentu, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pengangkatan dan pengkajian penelitian, serta diuraikan pula permasalahan muncul di lapangan. Selanjutnya adalah rumusan masalah, diikuti pula dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagaimana diuraikan pada sesi ini.

Bab kedua, merupakan bab landasan konseptula dan teoritis, serta beberapa sub bab lainnya. Bab ini dikemukakan dalam empat sub bab, terdiri atas teori efektivitas, konsep usaha menjahit, faktor pendukung usaha jahit, yang diikuti dengan pembahasan penelitian terkait (kajian pustaka atau penelitian terdahulu), dan pembahasan tentang kerangka penelitian.

Bab ketiga, merupakan bab metode penelitian, terdiri atas sub bahasan jenis penelitian, kemudian subjek dan objek penelitian, dan data teknik pemerolehannya, teknik pengumpulan data dan terakhir adalah metode analisis data yang sudah dikumpulkan sebelumnya.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Di dalam pembahasan inilah yang menjadi fokus kajian analisis uraian atas temuan penelitian. Bab empat tersusun atas empat pembahasan yang terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian, kemudian sub bahasan peran pemerintah Banda Aceh dalam menyalurkan fasilitas menjahit kepada kelompok jahit dalam pemberdayaan masyarakat, kemudian pembahasan terkait dampak penyaluran fasilitas tersebut bagi kelompok jahit yang dimaksudkan, pembahasan terakhir ialah penjelasan tentang efektivitas penyaluran menjahit memberdayakan masyarakat di Kota Banda Aceh.

Bab kelima merupakan bab terakhir, yaitu penutup. Bab ini di dalamnya terdapat temuan penelitian yang menjadi kesimpulan, dan beberapa saran atas temuan penelitian sebagai rekomendasi di dalam penelitian ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORETIS

#### 2.1 Teori Efektivitas

Teori efektivitas merupakan teori yang relatif umum dimuat dalam berbagai aspek pembahasan baik dalam ekonomi, organisasi, maupun kebijakan dan hukum. Oleh karena itu tidak sedikit peneliti atau ahli yang memuat istilah efektivitas kepemimpinan organisasi tertentu, efektivitas hukum dan lain sebagainya. Hanya saja, dalam penelitian ini, difokuskan dan diarahkan kepada teori efektivitas di dalam konteks ekonomi.

Istilah efektivitas, secara bahasa merupakan bentuk derivatif dari kata efek, kemudian berubah menjadi istilah efektif, dan istilah efektivitas. Ketiga-tiga istilah tersebut kemudian membentuk istilah baku dan menjadi satu kata yang berdiri sendiri. Kata efek berarti akibat pengaruh kesan yang timbul pada fikiran. Kata efektif berarti ada efeknya, ada akibatnya, ada pengaruhnya, manjur atau mujarab. Adapun kata efektivitas berarti keefektifan, yaitu keadaan berakibat atau keadaan berpengaruh, keberhasilan suatu usaha dan seterusnya (Tim Redaksi, 2008).

Istilah efektivitas ini sendiri pada asalnya diambil dari istilah di dalam bahasa Inggris, yaitu *effective*, kemudian membentuk kata *effectiveness* (Echols dan Shadily, 1992). Di dalam *Kamus Istilah Ekonomi*, disebutkan bahwa efektivitas ialah suatu besaran ataupun

angka untuk menunjukkan sampai seberapa jauh sasaran atau target dapat tercapai (Rochaety & Tresnanti, 2005).

Beberapa definisi makna bahasa di atas menunjukkan bahwa efektivitas diarahkan pada seberapa jauh suatu tujuan bisa dicapai atau seberapa efektif satu program, perbuatan, kegiatan dan lainnya bisa terlaksana dengan baik. Untuk mengimbangi definisi bahasa di atas, maka perlu dikemukakan definisi para ahli.

Menurut pandangan Robbins seperti dikutip Arindya (2019) bahwa efektivitas adalah sebuah ukuran dalam konteks pencapaian satu organisasi tertentu, baik di dalam jangka waktu yang pendek, maupun dalam jangka waktu yang relatif panjang. Efektivitas juga bermakna suatu standar ukuran untuk merefleksikan suatu tujuan apakah dapat dicapai oleh organisasi atau tidak. Intinya, efektivitas selalu tertuju pada pencapaian suatu tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan. Pengertian berikutnya dikemukakan oleh Miller, bahwa maksud dari efektivitas merupakan satu ukuran seberapa jauh suatu kinerja atau program dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas di dalam konsepnya berbeda dengan efisiensi, keduanya harus pula dibedakan secara detail. Efektif lebih diarahkan kepada pencapaian terhadap satu tujuan, sementara efisiensi lebih mengarah pada hasil dengan membandingkan biaya yang diperlukan dengan hasil yang diperoleh (Humaedi, et al, 2016: 41). Jadi, efektivitas dengan efisiensi berbeda dalam hal esensi yang dianalisis. Apabila dalam efektif tidaknya kinerja diarahkan pada analisis pencapaian tujuan, maka dalam efisiensi diarahkan pada analisis biaya dengan

hasilnya. Semakin rendah biaya yang diperlukan, maka hasil suatu program semakin efisien.

Menurut Sarifuddin (2021), bahwa efektivitas adalah tingkat sejauhmana tujuan ataupun sasaran tercapai. Definisi ini cenderung lebih sederhana, dan dapat menjangkau semua aspek yang diukur melalui efektivitas, baik afektivitas organisasi, kebijakan ekonomi, dan yang lainnya. Sementara itu, definisi yang dikemukakan oleh Robbins di atas tampak diarahkan kepada efektivitas organisasi.

Pengertian berikutnya bisa dipahami pengertian ahli ekonomi yang dikutip oleh Syam (2020), sebagai berikut:

1. Prasetyo Budi Saksono menyatakan efektifitas ialah seberapa besar tingkat kelekatan *output*/keluaran yang dicapai dengan *output* yang diharapkan dari jumlah *input*/masukan di dalam suatu perusahaan atau seseorang.
2. Hidayat mengemukakan bahwa efektivitas ialah suatu ukuran perusahaan yang menyatakan seberapa target yakni kuantitas, kualitas dan waktu telah tercapai secara jauh, di mana makin besar persentase target yang dicapai maka akan makin tinggi efektifitasnya.
3. Schemerhon John menyebutkan efektifitas adalah pencapaian target keluaran (*output*) yang diukur dengan membandingkan *output* anggaran atau OA/seharusnya dengan *output* realisasi atau OS/sesungguhnya apabila  $OA > OS$  maka disebut dengan efektif.

Secara umum suatu aktivitas ekonomi di dalam masyarakat di wilayah tertentu dikatakan berhasil, efektif, dan sesuai dengan tujuan ketika memenuhi beberapa faktor yang mendukungnya. Hal yang paling umum dalam mengukur efektivitas terkait sesuatu ialah terkait *outcome* (hasil) program atau kegiatan yang dinilai efektif jika *output* yang dihasilkan memenuhi tujuan yang diharapkan.

Satu kegiatan bisa dikatakan telah efektif dijalankan setelah memenuhi standar ukuran tertentu. Menurut Krech, bahwa ukuran dan standar penentuan efektivitas ada empat faktor sebagai berikut:

1. Faktor yang paling mudah dilihat dalam mengukur efektivitas adalah mengenai jumlah atau temuan hasil akhir dikeluarkan dari suatu program. Hasil akhir ini berupa kuantitas, kualitas, maupun bentuk fisik, baik dalam sebuah organisasi, maupun di dalam bentuk program dan kegiatan. Maksud hasil akhir di sini menjadi ukuran dalam menentukan efektif tidaknya suatu kegiatan. Caranya adalah dengan memperbandingkan rasio di antara masukan atau *input* dengan keluaran atau *output*.
2. Faktor yang kedua adalah tingkat kepuasan dari kegiatan yang sudah dilakukan. Faktor ini dapat dilihat melalui pelaksanaan proses kuantifikasi berdasarkan jumlah kepuasan itu sendiri, basisnya adalah kepuasan orang yang menjadi subjek layanan dari suatu kegiatan, juga dapat diukur kuantitatif berdasarkan tinggi atau banyaknya kualitas mutu dari hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan.

3. Faktor yang ketiga adalah hasil kegiatan itu termasuk sebagai suatu produk kreatif, artinya bahwa penciptaan suatu produk kegiatan dapat dimanfaatkan dan berlaku secara fungsional di tengah masyarakat, juga dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.

4. Faktor berikutnya adalah tingkat intensitas yang dicapai oleh kegiatan yang sudah dilaksanakan. Maknanya bahwa dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan punya ketaatan yang tinggi sehingga para pelaku dan subjek yang disasar dari kegiatan tersebut punya rasa memiliki dengan kadar yang besar, tinggi (Humaedi, et al, 2016)

Keempat faktor sebagaimana disebutkan oleh Krech tersebut di atas harus dipenuhi secara keseluruhan, hingga sifat pemenuhan faktor tersebut adalah kumulatif (harus semuanya dipenuhi), bukan alternatif atau salah satu dari keempat faktor tersebut. Oleh karena itu, jika satu saja dari empat faktor tersebut tidak terpenuhi, maka suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan belum ataupun tidak efektif dilakukan.

Berbeda dengan pendapat Krech di atas, Cambell justru telah mengidentifikasi sebanyak 12 faktor yang menentukan efektif atau tidak suatu kegiatan, yaitu:

1. Kualitas dari kegiatan yang telah dilakukan, artinya kualitas atau mutu dari kegiatan sebuah organisasi, sehingga kegiatan sebuah lembaga, instansi, kelompok masyarakat atau lainnya

bisa dikatakan efektif jika memenuhi kualitas program sudah baik.

2. Faktor berikutnya ialah produktivitas, yaitu kuantitas jumlah jasa yang dihasilkan suatu program dan kegiatan yang sudah dihasilkan.
3. Faktor selanjutnya adalah kesiagaan, yaitu adanya penilaian yang dilakukan secara menyeluruh. Untuk itu, bila ditemukan adanya kendala ataupun hambatan dari pelaksanaan kegiatan maka dapat diantisipasi dan diselesaikan secara baik.
4. Efisiensi, yaitu suatu pola memperbandingkan antara prestasi yang sudah dilaksanakan dari kegiatan dengan biaya terhadap pencapaian prestasi itu. Apabila prestasi kegiatan dipandang baik dengan biaya yang relatif rendah, maka kegiatan telah dinyatakan memenuhi ukuran efisiensi, sehingga sendirinya efisiensi ini mampu mengarahkan pada efektivitas kegiatan.
5. Penghasilan yang sudah dicapai, yaitu bersinggungan dengan sumber daya yang masih ada setelah semua biaya dan semua kewajiban sudah dipenuhi. Artinya, penghasilan di sini terkait dengan adanya sisa sumber daya, baik biaya, fasilitas dan yang lainnya, meski kegiatan tersebut sudah selesai dilakukan dengan baik.
6. Pertumbuhan, yakni proses memperbandingkan di antara satu ekstensi yang ada sekarang (setelah dilaksanakan kegiatan) dengan masa lalu (sebelum kegiatan dilaksanakan).

- 
7. Faktor berikutnya adalah adanya semangat kerja yang baik. Dalam hal ini suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila ada perasaan terikat di dalam kegiatan itu sehingga berusaha untuk mencapai tujuan dengan maksimal. Perlu adanya usaha tambahan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara kerja sama dalam mencapai tujuan, dan perasaan memiliki dari masing-masing pelaksana kegiatan.
8. Tingkat stabilitas yang tinggi, yaitu dalam kaitannya dengan pemeliharaan struktur, fungsi dan juga sumber daya sepanjang waktu.
9. Kemampuan dalam menanggulangi kecelakaan, yaitu upaya dalam perbaikan atas akibat dari kesalahan dalam melakukan suatu kegiatan.
10. Adanya motivasi dari setiap individu pelaksana kegiatan itu di dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan.
11. Adanya keterpaduan yaitu antara satu sama lain mempunyai sikap saling menyukai satu sama lain tanpa ada konflik yang berarti. Maksudnya adalah bahwa adanya kerja sama yang baik, mempunyai komunikasi dan saling mengkoordinasikan semua hal yang berkaitan dengan kegiatan, semua dilakukan atas dasar pencapaian tujuan bersama yang dicita-citakan.
12. Keluesan adaptasi, yaitu adanya upaya dalam mengubah hal-hal yang menjadi kebiasaan dalam melaksanakan kegiatan di dalam standar operasi yang biasa, kemudian disesuaikan dengan perubahan yang ada. Hal ini dimaksudkan agar

apabila dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan menemukan kondisi yang berbeda dari sebelumnya, standar operasional yang sudah ada itu dapat diubah dengan menyesuaikannya terhadap kondisi baru. Hal ini semata-mata agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara baik dan maksimal. Dalam hal ini, dapat pula dipahami bahwa proses pelaksanaan kegiatan tidak harus kaku, namun dapat beradaptasi dengan kondisi yang baru, dan mendapai tujuan yang dicita-citakan, dengan begitu efektivitas kerja dapat dicapai (Humaedi, et al, 2016).

Indikator efektivitas juga dikemukakan Venda dan Ma'ruf (2017: 4) ada empat indikator yaitu:

1. Ketepatan Sasaran. Ketepatan sasaran berarti kesesuaian atas perencanaan dengan hasil yang telah diperoleh pada kegiatan tertentu. Dalam pengertian yang lain, ketepatan sasaran ialah sejauh mana hasil yang sudah dikerjakan itu telah sesuai serta selaras dengan ketentuan yang sudah direncanakan, atau telah sesuai dengan regulasi yang menjadi basis dalam kegiatan.
2. Sosialisasi program, yaitu upaya untuk menyebarluaskan atau memberikan informasi sebuah kegiatan yang akan dilakukan. Subjek yang menjadi tujuan sosialisasi ini adalah masyarakat yang menjadi tempat atau tujuan suatu kegiatan itu dilakukan. Adapun pelaksana program adalah pihak yang melaksanakan program, baik perorangan, kelompok, maupun atas nama satu lembaga tertentu, atau instansi tertentu, termasuk pemerintah terhadap masyarakat.

3. Tujuan program, merupakan tujuan yang hendak dicapai dari suatu program yang akan dilaksanakan. Tujuan program ialah sangat terkait dengan sejauhmana suatu kinerja (*output*) dapat mencapai suatu tujuan yang dihasilkan.
4. Pemantauan program, yaitu suatu upaya dalam meninjau dan melihat kembali sebuah program yang telah dilaksanakan di lapangan apakah berjalan secara baik atau tidak, apakah suatu program itu tepat sasaran atau tidak.

Empat kriteria di atas digunakan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, yaitu mengenai efektivitas program pemberdayaan masyarakat di dalam kelompok usaha bersama. Keempat indikator tersebut diuji untuk mengukur terpenuhi tidaknya empat indikator tersebut dalam realisasinya.

Terkait dengan penelitian ini, empat indikator terakhir di atas juga dipakai di dalam menguji dan mengukur efektifitas penyaluran fasilitas menjahit pada kelompok jahit di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Secara lebih rinci, empat indikator tersebut tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa untuk ketepatan sasaran, ditujukan apakah penyaluran fasilitas menjahit sudah diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak menerima atau tidak, selanjutnya tentang ada tidaknya sosialisasi program kepada kelompok jahit, tercapai tidaknya tujuan program penyaluran fasilitas menjahit, dan ada atau tidak pemantauan dan pengawasan lebih lanjut terhadap penyaluran fasilitas menjahit. Jadi, indikator tersebut menjadi batu uji di dalam melihat efektivitas penyaluran fasilitas menjahit yang dilaksanakan

oleh Dinas Tenaga Kerja Banda Aceh terhadap kelompok menjahit di Kecamatan Meuraxa.

## 2.2 Usaha Menjahit dan Faktor Pendukungnya

Usaha menjahit merupakan salah satu jenis usaha yang relatif banyak digeluti masyarakat mulai dari usaha jahit dengan sarana prasarana yang sederhana atau terbatas, hingga usaha jahit produksi pakaian yang disebut industri konveksi. Usaha menjahit biasanya dilaksanakan dan cocok kepada wanita (Musfah, 2018), meski tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh kalangan pria, bahkan ada yang melakukan kerja sama secara mutual.

Usaha menjahit dilakukan bisa berbentuk kelompok maupun perorangan. Dinamakan sebagai usaha jahit perseorangan karena di dalam proses pelaksanaannya dilaksanakan secara individu, dapat pula berbentuk kelompok, di mana fasilitas dan juga kelengkapan alat-alatnya, fasilitas menjadi seperti mesin dan alat menjahit yang lainnya relatif telah baik (Suprihatiningsih, 2020).

Usaha menjahit atau industri adalah usaha bidang busana jadi secara besar-besaran atau secara massal. Di dalam banyak literatur, konveksi disebut dengan istilah *home industry*. Bila kapasitasnya sangat besar lazimnya disebut dengan usaha *garmen*. Sementara itu *garmen* sendiri sebenarnya berarti pakaian telah jadi. Produk dari konveksi adalah busana jadi atau *ready-to-wear* (Inggris) dan juga *pret-a-porter* (Perancis).

Usaha jahit menjahit menjadi bagian yang sangat penting di dalam perkembangan perekonomian di tengah-tengah masyarakat.

Kemunculan dan juga keberadaan usaha menjahit ini secara prinsip mengimbangi kebutuhan masyarakat akan pakaian. Manusia adalah makhluk sosial memerlukan pakaian dalam berbagai bentuk sesuai keinginan. Dalam produksinya, *skill* pembuatan atau penempahan bahan baku pakaian atau kain hanya dapat dilaksanakan di bidang jahit menjahit, sehingga keberadaannya relatif sangat penting dan dibutuhkan.

Menjalankan usaha menjahit tentunya harus didukung dengan berbagai faktor yang mendukungnya, mulai dari faktor kematangan *skill* (keahlian menjahit), pelatihan, permodalan atau pembiayaan, maupun faktor sarana dan prasarana ataupun fasilitas kerja yang ke semua aspek tersebut saling berhubungan satu dengan lainnya. Di dalam aspek kematangan *skill* misalnya memiliki hubungan dengan aspek pelatihan. Begitu pun dalam faktor sarana-prasarana ataupun fasilitas kerja mempunyai hubungan dengan aspek permodalan dan pembiayaan.

#### 1. Faktor Keterampilan (*Skill*)

Dalam rangka menunjang kinerja seorang individu, salah satu faktor penunjangnya adalah keterampilan. Keterampilan atau *skill* (Inggris) merupakan kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat. Menurut Nadler, sebagaimana diulas oleh Suprihatiningsi (2020), bahwa yang dimaksud keterampilan atau *skills* adalah kegiatan yang memerlukan praktik atau implikasi satu aktivitas. Masih di dalam kutipan yang sama, Dunnette (dalam Suprihatiningsi, 2020) mengemukakan bahwa keterampilan adalah

kapasitas yang dibutuhkan untuk mampu melaksanakan beberapa tugas yang merupakan pengembangan dari hasil *training*/pelatihan dan pengalaman yang didapat.

## 2. Faktor Pelatihan (*Training*)

Menurut Ivancevic (seperti dikutip Soetrisno, 2017), bahwa pelatihan merupakan usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan yang lain yang akan dijabatnya segera. Masih dalam kutipan yang sama, Soetrisno juga mengulas pendapat Sikula, bahwa yang dimaksudkan dengan pelatihan adalah proses pendidikan dalam jangka pendek yang pada pelaksanaannya menggunakan prosedur yang sistemik, kemudian terorganisasi yang dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan, selain itu juga untuk mengembangkan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu.

## 3. Faktor Permodalan dan Pembiayaan (*Capital dan Financing*)

Modal meliputi segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia dan dipakai untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang mereka inginkan (Fuad, Christin, Nurlela, Sugiarto & Paulus, 2006: 16). Secara umum modal di dalam konteks usaha atau modal kerja merupakan dana yang dialokasikan terhadap keperluan pembiayaan operasional perusahaan. Makna dari istilah pembiayaan operasional perusahaan adalah pembiayaan untuk mendukung aktivitas sehari-hari perusahaan, misalnya pembelian untuk kepentingan bahan dan upah bagi pekerja dan lainnya (Anwar, 2019: 28).

Modal dalam makna yang umum digunakan di dalam dua hal. Pertama yaitu untuk keperluan investasi, artinya dana atau modal digunakan untuk suatu keperluan membeli atau pembiayaan dalam kriteria jangka panjang. Kedua ialah untuk biaya modal kerja, yaitu modal yang digunakan di dalam kerangka jangka pendek, misalnya pembelian bahan baku, gaji dan upah, dan lainnya (Kasmir, 2009: 212).

Sementara itu, pembiayaan merupakan tindakan memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan defisit unit (Antonio, 2007: 160). Istilah pembiayaan sering disebut dengan *financing* (Inggris) ataupun *al-tamwīl* (Arab), yang menurut pengertian Nafis (2011: 237) dan Fauzan (2017: 140) mendefinisikan pembiayaan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam bentuk penyediaan dana atau tagihan.

Modal dan pembiayaan atau *financing* menjadi bagian yang relatif sangat penting dalam segala jenis usaha ekonomi dan bisnis Islam. Modal merupakan sejumlah dana yang dipakai agar mampu menjalankan kegiatan usaha, pada perusahaan umumnya diperoleh dengan cara menerbitkan saham (*capital*). Istilah modal bermakna yaitu dana dari pendiri atau pemilik saham lembaga tersebut yang digunakan untuk kegiatan operasional dan juga investasi (Sholihin, 2010). Dalam konteks usaha jahit menjahit, maka aspek modal dan juga biaya ini juga sangat penting untuk dipenuhi. Permodalan ini dapat disediakan secara mandiri atau melalui biaya-biaya dari luar, seperti misalnya modal dan biaya yang diberikan oleh pemerintah

di dalam bentuk pemberdayaan khusus usaha jahit, misalnya mesin jahit, dan lain sebagainya.

#### 4. Faktor Sarana-Prasarana atau Fasilitas Kerja (*Facility*)

Sarana-prasarana atau fasilitas kerja merupakan sarana atau wahana, alat untuk mempermudah aktivitas perusahaan dan untuk mensejahterakan karyawan agar para karyawan bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Jadi, fasilitas kerja adalah sesuatu yang harus disediakan perusahaan, baik fasilitas yang disediakan secara langsung maupun fasilitas pendukung untuk kemudahan dan juga kenyamanan bagi karyawan dalam melakukan pekerjaan (Sabri dan Susanti, 2021: 196). Dalam makna lain, fasilitas kerja merupakan sarana dan prasarana agar memudahkan pekerjaan yang disediakan oleh berbagai organisasi didalam membantu pencapaian target-target yang telah ditetapkan (Sopanah, Bahri, Candra, Hasan, Wiwin, Purnomowati., dkk, 2021: 102).

Selain keterampilan, pelatihan, permodalan dan pembiayaan, aspek pendukung usaha di dalam bidang jahit menjahit juga sangat ditentukan oleh tersedianya kualitas dan kuantitas sarana-prasarana ataupun fasilitas kerja. Fasilitas kerja menjadi bagian yang relatif sangat untuk mendukung jalannya usaha menjadi lebih maksimal. Fasilitas ataupun sarana-prasarana di dalam konteks usaha bidang jahit menjahit misalnya, tempat kerja, mesin jahit, dan peralatan lainnya yang bisa menjadikan kinerja usaha jahit menjadi maksimal dan efektif.

Sarana-prasarana atau fasilitas yang dimaksud idealnya harus terpenuhi aspek kuantitas dengan baik lengkap dan tertentu sifatnya tanpa ada kekurangan. Di samping kuantitas, sarana-prasarana atau fasilitas kerja juga harus memenuhi aspek kualitas yang baik. Hal ini semata untuk mendukung usaha ekonomi menjadi lebih baik ataupun maksimal.

### 2.3 Penelitian Terkait

Untuk mendukung penelitian, maka penulis mengemukakan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan dan relevan bagi penelitian ini. Sub bahasan ini dijelaskan dengan tujuan dan maksud untuk mengetahui sejauhmana tulisan tentang efektivitas penyaluran fasilitas menjahit oleh Dinas Tenaga Kerja dalam upaya membuka lapangan kerja kepada kelompok jahit dalam Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Di samping itu tujuan sub bahasan ini untuk menghindari plagiasi.

Sejauh amatan penulis, ada beberapa penelitian yang relevan, di antaranya dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu yang Relevan**

| No | Peneliti              | Judul                                                                            | Hasil                                                                                                                                                                                                     | Persamaan                                         | Perbedaan                                                                                                          |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Nailis Sa'adah (2020) | Efektifitas Penyaluran Modal Usaha Mesin Jahit Terhadap Pendapatan Amanda Taylor | Penyaluran bantuan modal usaha mesin jahit efektif dalam meningkatkan pendapatan Amanda Taylor. Mesin jahit yang diterima membuat pekerja lebih cepat dan efisien dalam menyelesaikan orderan. Pendapatan | Penelitian ini juga terkait dengan usaha menjahit | Fokus yang membedakan adalah subjek penelitian, yaitu di Dinas Tenaga Kerja. Selain itu, fokus yang lainnya adalah |

**Tabel 2.1-Lanjutan**

| No | Peneliti                                                    | Judul                                                                                                                                                                                                        | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Persamaan                                                                                                              | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                             | Gampong Peunayong Kota Banda Aceh                                                                                                                                                                            | Amanda Taylor juga meningkat setelah menerima penyaluran modal usaha tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | objek yang disasar, yaitu pendapatan, bukan peningkatan peluang kerja                                                                                                                                                                             |
| 2  | Jurnal: Kurnia Vinda dan Muhammad Farid Ma'ruf (2017)       | Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat dlm Kelompok Usaha Bersama: Studi Kasus Pada Pemberian Bantuan Mesin Jahit Kelompok Usaha Bersama Bunga Sejahtera Desa Ngampungan Kecamatan Bareng Kab. Jombang. | Keefektifan program pemberdayaan masyarakat dalam Kelompok Usaha Bersama di Desa Ngampungan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang belum dikatakan baik. Hal ini dilihat dari empat indikator efektivitas program bahwa hanya dua indikator yang bisa dikatakan baik yaitu pada indikator ketepatan sasaran dan sosialisasi program. Kondisi yang terjadi pada Kelompok Usaha Bersama Bunga Sejahtera sampai saat ini masih bergantung pada pengumpul | Penelitian ini juga meneliti tentang efektivitas, terutama pada fokus pemberian bantuan modal usaha di bidang konveksi | Perbedaannya adalah, bahwa di dalam jurnal tersebut, subjek kajian dilakukan terhadap kelompok usaha bersama di Kec. Bareng, adapun dalam skripsi ini dilakukan di Kec. Meruraxa, Kota Banda Aceh, dengan objeknya adalah membuka lapangan kerja. |
| 3  | Jurnal: Dewa Ayu Wartaputriningsih dan I Made Jember (2018) | Efektivitas dan Dampak Program Bantuan Kelompok Usaha Bersama (Kube) terhadap Pendapatan dan                                                                                                                 | Hasil analisis Efektivitas menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan program bantuan KUBE dilihat dari indikator input, proses, dan output di Kabupaten Gianyar sangat efektif. Begitu pula hasil analisis Wilcoxon juga menunjukkan bahwa program bantuan KUBE                                                                                                                                                                                      | Penelitian ini sama-sama di dalam upaya menemukan efektivitas, khususnya penyaluran bantuan.                           | Perbedaannya adalah jurnal tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian yang kedua, yaitu di dalam upaya melihat dampak dari program                                                                                                             |

**Tabel 2.1-Lanjutan**

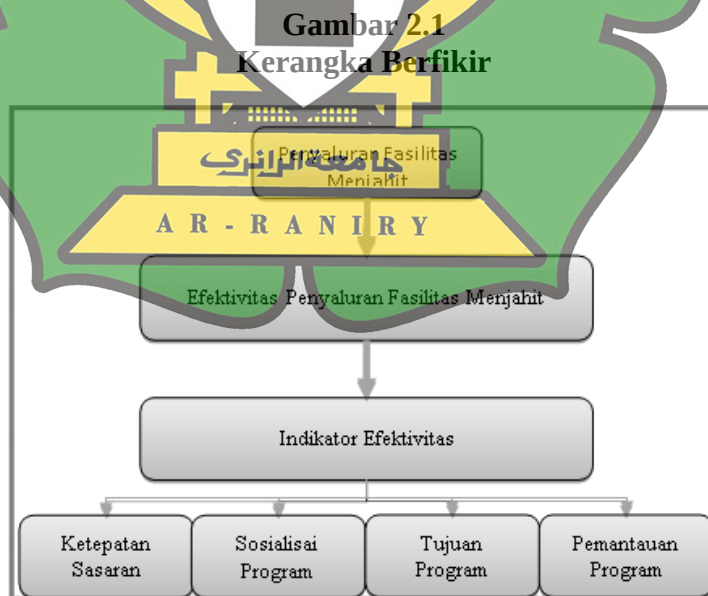
| No | Peneliti                              | Judul                                                                                                     | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Persamaan                                                                        | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                       | Kesempatan Kerja Rumah Tangga Sasaran Kab. Gianyar.                                                       | berdampak positif signifikan.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  | bantuan fasilitas menjahit.                                                                                                                                                                                                                        |
| 4  | Jurnal: Baihaqi & Syar diansah (2019) | Efektifitas Pemberian Modal Usaha Bergulir DP3AKB pada Kelompok Usaha Perempuan Miskin di Kab. Aceh Timur | Penelitian ini dilakukan pada 9 dari 23 kelompok usaha perempuan miskin di Kabupaten Aceh Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektifitas modal usaha bergulir DP3AKB (dulunya bernama BPMPKS) bagi kelompok usaha perempuan miskin sejak tahun 2011-2014. | Penelitian ini sama-sama menjelaskan dan meneliti efektifitas penyaluran bantuan | Perbedaannya, objek penelitian lebih kepada pemberian bantuan untuk keluarga dan perempuan miskin, bukan dalam bidang usaha jahit.                                                                                                                 |
| 5  | Jurnal: Lisda Van Gobel (2015)        | Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial Kepada Kelompok Usaha Bersama Di Kecamatan Bolaang Mongondow Selatan | Efektifitas Pemberian Bantuan Sosial Kepada KUBE fakir miskin yang ada di Kecamatan Posigadan belum optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya pendapatan dan taraf hidup KUBE fakir miskin itu sendiri disebabkan oleh permasalahan yang dihadapi oleh KUBE.                              | Penelitian tersebut sedikitnya juga menyinggung tentang teori efektivitas        | Perbedaannya, pada objek kajian, di mana penelitian di atas lebih mengarah pada analisis afektivitas pemberian bantuan sosial, tetapi dalam penelitian ini ingin meneliti usaha menjahit dan penyaluran fasilitas menjahit oleh Dinas Tenaga Kerja |

Sumber: Data Olahan

Lima penelitian di atas merupakan gambaran penelitian yang telah dilaksanakan peneliti sebelumnya. Temuan-temuan penelitian diarahkan pada usaha menjahit dan tampak tidak menyentuh pada objek penelitian. Kesamaan-kesamaan yang diperoleh khususnya dalam pembahasan konsep usaha menjahit dan konveksi, sementara untuk fokus penelitiannya berbeda. Skripsi ini secara khusus justru melihat dan menganalisis efektivitas penyaluran fasilitas menjahit oleh dinas tenaga kerja di dalam upaya membuka lapangan kerja, yaitu dengan mengambil studi pada kelompok jahit di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.

## 2.4 Kerangka Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan kerangka penelitian tertentu, sebagaimana dapat dikemukakan dalam Gambar 2.1 di bawah ini:



Sumber: Data Olahan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah kualitatif dengan studi lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dipakai untuk melaksanakan analisis kepada objek yang alamiah, di mana penelitian merupakan instrumen kunci pada pelaksanaan penelitian (Sugiyono, 2013). Di objek yang alamiah dimaksudkan pada temuan fakta alamiah di lapangan khususnya menyangkut efektivitas penyaluran fasilitas menjahit oleh dinas tenaga kerja di dalam upaya membuka lapangan kerja, yaitu dengan mengambil studi pada kelompok jahit di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.

#### **3.2 Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian dan objek penelitian adalah dua variabel di dalam suatu penelitian. Subjek penelitian ialah subjek yang diteliti baik itu orang maupun benda, termasuk lembaga maupun organisasi. Dalam makna yang lain, subjek penelitian adalah orang yang pada posisinya menjadi sentral yang hendak diteliti (Arikunto, 2010). Di dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan subjek penelitian adalah pemerintah Kota Banda Aceh atau yang melaksanakan tugas dan fungsi ketenagakerjaan berhubungan dengan penyaluran sarana dan fasilitas menjahit. Selain pemerintah, subjek berikutnya adalah orang atau kelompok jahit yang menerima fasilitas menjahit.

Adapun yang dimaksud dengan objek penelitian adalah satu sifat yang melekat pada subjek penelitian yang hendak diteliti serta ditelaah secara lebih jauh dan sistematis. Di dalam makna yang lain objek penelitian adalah suatu sifat atau keadaan, kondisi, yang ada yang akan diteliti. Adapun dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan objek penelitian adalah penyaluran fasilitas menjahit, serta efekti tidaknya penyaluran itu dilaksanakan oleh pemerintah Kota Banda Aceh kepada kelompok menjahit.

### **3.3 Data dan Teknik Pemerolehannya**

Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa data penelitian dapat diperoleh dari dua sumber yaitu sumber primer pokok dan sumber sekunder. Demikian juga dalam penelitian ini, karena masuk dalam penelitian lapangan yang datanya diperoleh langsung dari latar alami sebagai sumber primer. Dalam batasan tertentu, penelitian ini juga diperoleh dari data kepustakaan sebagai sumber sekundernya. Untuk itu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan sekunder.

#### **3.3.1 Data primer**

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data secara langsung pada peneliti. Data primer diperoleh melalui dua cara, yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Kedua cara ini diharapkan mampu memberi temuan-temuan atas masalah-masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai ada 15 informan, yaitu:

- a. Pimpinan Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari Kepala Dinas (1 orang) dan Sekretaris (1 orang)
- b. Kepala Bidang (1 orang)
- c. Penyalur Lapangan (2 orang)
- d. Pengusaha Jahit (10 orang)

Subjek penelitian atau pihak-pihak yang terlibat dan relevan dengan penelitian ini dipilih sedemikian rupa dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Arikunto (2010), maksud dari *purposive sampling* yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu. Sesuai namanya sampel diambil dengan satu maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu yang diambil sampel karena dianggap memiliki informasi yang memadai dan mampu mewakili jumlah keseluruhan subjek penelitian yang ada.

*Purposive sampling* menjadi bagian dari teknik menentukan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu ataupun tujuan dan nilai guna individu terhadap suatu penelitian. Dengan begitu pemilihan subjek penelitian dengan cara *purposive sampling* ini sepenuhnya atas pertimbangan peneliti (Ismail, 2018). Dalam pemilihan sampel skripsi ini, peneliti menentukan beberapa kriteria penting sehingga sampel yang dimaksud dianggap relevan, mempunyai kompetensi dalam memberi informasi yang peneliti butuhkan. Adapun kriteria sampel tersebut yaitu:

- a. Harus sebagai pegawai atau staf pada Dinas Tenaga Kerja di Kota Banda Aceh.

- b. Pegawai ataupun staf tersebut pernah melakukan penyaluran atau pelatihan jahit pada masyarakat, kemudian mengetahui alokasi penyaluran fasilitas jahit.
- c. Kriteria selanjutnya adalah informan atau sampel penelitian ini harus orang yang berprofesi sebagai pengusaha jahit.
- d. Pengusaha jahit tersebut harus pula berada di dalam wilayah hukum Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh

Empat kriteria di atas penting ditentukan supaya pengambilan sampel di lapangan tidak begitu luas, dan dipandang hanya orang-orang yang secara langsung terlibat dalam permasalahan penelitian dan mampu memberikan informasi yang cukup terhadap kebutuhan data penelitian.

### **3.3.2 Data sekunder**

Data sekunder merupakan data yang digali dari sumber yang tidak langsung, sebab hanya memberikan keterangan-keterangan atas sumber data primer. Untuk itu, cara yang dilakukan adalah dengan merujuk kepada literatur-literatur kepustakaan seperti buku, kamus, ensiklopedi, jurnal dan bahan-bahan lain yang dirujuk dari sumber kepustakaan.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian ini secara langsung diperoleh dari teknik yang tertentu. Dalam penelitian lapangan, data yang diperoleh ialah data mentah dari lapangan kemudian dianalisis berdasarkan kaidah yang tepat dan sistematis. Secara umum, data penelitian lapangan biasa diperoleh melalui tiga, yaitu observasi, wawancara, dan telaah studi

dokumentasi yang memberi keterangan langsung mengenai objek penelitian (Sugiyono, 2013). Di penelitian ini, teknik yang dipakai hanya ada dua, yaitu wawancara dan studi dokumentasi, sementara untuk observasi tidak digunakan.

Wawancara adalah proses tanya jawab secara langsung pada subjek penelitian untuk menemukan objek yang sedang diteliti. Di dalam makna lain, wawancara merupakan proses untuk mengetahui informasi terhadap subjek penelitian, caranya adalah melaksanakan wawancara, menayakan langsung kepada informan mengenai objek penelitian.

Wawancara pada umumnya memiliki tiga bentuk, wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, terakhir ialah wawancara tak terstruktur.

Makna wawancara terstruktur merupakan wawancara dengan menggunakan panduan wawancara, di mana panduan wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan baku serta pilihan jawabannya. Di dalam jenis wawancara ini, peneliti hanya bertanya menggunakan pertanyaan yang sudah ditentukan, sementara informan menjawab sesuai pilihan jawaban yang sudah ditentukan.

Adapun wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang menggunakan pedoman wawancara, hanya saja dalam prosesnya peneliti juga dapat untuk menambah pertanyaan lain, serta pihak informan juga dapat menjawab pertanyaan di luar peroman yang telah ditentukan.

Terakhir adalah wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara bebas, di mana peneliti tidak menggunakan daftar wawancara yang baku, sehingga prosesnya lebih bebas, alami, sebagaimana halnya tanya jawab biasa, dalam kondisi yang santai, dan peneliti di dalam hal ini memberikan pertanyaan dan informan dapat menjawab pada jawaban yang bebas.

Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam skripsi ini adalah wawancara jenis yang bentuk yang ketiga, yaitu wawancara tak terstruktur. Pemilihan jenis wawancara ini di samping mudah untuk dilakukan, peneliti juga dapat mengajukan pertanyaan secara bebas sehingga diharapkan dapat mendalami permasalahan secara mendalam.

#### **3.4.1 Studi Dokumentasi**

Data dokumentasi ialah salah satu sumber data, memberikan informasi yang berasal dari catatan-catatan penting baik dari suatu lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dalam makna yang lain, dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber-sumbernya yang terpercaya, baik lembaran Peraturan Perundangan, catatan dan tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian, notulen, agenda dan lain sebagainya, yang pada intinya dapat memberikan data-data yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

### 3.5 Metode Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan dari berbagai sumber baik dari hasil wawancara, studi dokumentasi, serta temuan dari bahan yang ada di perpustakaan, maka dilakukan analisis secara sistematis yang sifatnya kualitatif, yaitu menganalisis temuan penelitian memakai konsep-konsep dan teori yang digunakan, tanpa menggunakan data statistik seperti halnya dalam penelitian kuantitatif. Sifat analisis di dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*, yaitu menguraikan dan menggambarkan masalah penelitian apa adanya sesuai dengan temuan penelitian, serta temuan tersebut akan dianalisis sistematis dengan menggunakan konsep-konsep dan teori yang telah ada yang ditentukan dalam penelitian ini.

Analisis data penelitian ini meliputi langkah-langkah tertentu yang terdiri dari langkah pengumpulan data dari berbagai sumber. Langkah berikutnya adalah reduksi data, yaitu menyempitkan dan membuat kategori data yang penting dan tidak penting. Data yang tidak penting akan dibuang dan data penting akan dianalisis. Ketiga adalah dengan langkah menyajikan data, atau *display* data, yakni di dalam pelaksanaannya, data yang sudah direduksi akan dituliskan dalam bentuk tulisan ilmiah dan sistematis, dan datanya dianalisis dengan menggunakan teori. Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan.

Skripsi ini disusun melalui beberapa cara teknik penulisan yang ilmiah, yaitu berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang

diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis gunakan dengan mengutipnya dari Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan Kementerian Agama Republik Indonesia, tahun terbit yaitu 2012.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, terutama pada kelompok jahit. Kota Banda Aceh memiliki riwayat yang panjang. Ditinjau dari aspek historis, Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Kesultanan Aceh yang berdiri pada abad ke-14. Kesultanan Aceh dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha yang pernah ada sebelumnya, seperti Kerajaan Indra Purba, selain itu Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra, dan Kerajaan Indra Pura (Indrapuri). Berdasarkan batu nisan Sultan Firman Syah, salah seorang sultan yang pernah memerintah Kesultanan Aceh, terbukti bahwa Kesultanan Aceh beribu kota di Kuta Raja atau Banda Aceh (Sufi, 1997). Sebagai suatu pusat pemerintahan, Kota Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya (Iradah, dkk, 2020).

Nama Banda Aceh menjadi nama ibu kota resmi ditetapkan pada tahun 1963 yang sebelumnya diberi nama Kutaraja, ini sesuai Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan otonomi Daerah pada tanggal 9 Mei 1963, Nomor 52/1/43-43. Semenjak tanggal tersebut Banda Aceh resmi menjadi nama ibukota Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam bukan lagi Kutaraja (Iradah, dkk, 2020).

Setelah kemerdekaan Indonesia, berbagai perubahan bentuk dan sistem pemerintahan telah beralih dari kerajaan menjadi sebuah

wilayah kota dalam Provinsi Aceh. Banda Aceh pernah mengalami masa duka pada waktu terjadi bencana alam gempa dan tsunami hari Minggu 26 Desember 2004. Atas peristiwa tersebut, sepertiga dari wilayah Kota Banda Aceh hancur. Ratusan ribu penduduk menjadi korban bersama dengan harta benda warga.

Secara administratif, Kota Banda Aceh terdiri dari 9 wilayah administratif kecamatan, 17 kemukiman, 70 desa, dan 20 kelurahan (Iradah, dkk, 2020). Awalnya, Kota Banda Aceh hanya terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Meuraksa, Baiturrahman, Kuta Alam dan Syiah Kuala. Kota Banda Aceh dikembangkan lagi menjadi 9 kecamatan baru sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Kecamatan, Mukim dan Gampong**  
**di Kota Banda Aceh**

| No | Kecamatan    | Ibu Kota    | Jumlah<br>Pemukiman | Jumlah<br>Gampong |
|----|--------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 1  | Meuraxa      | Ulee Lheue  | 2                   | 16                |
| 2  | Jaya Baru    | Lampoh Daya | 2                   | 9                 |
| 3  | Banda Raya   | Lamlagang   | 2                   | 10                |
| 4  | Baiturrahman | Neusu Jaya  | 2                   | 10                |
| 5  | Lueng Bata   | Lueng Bata  | 2                   | 9                 |
| 6  | Kuta Alam    | Bandar Baru | 2                   | 11                |
| 7  | Kuta Raja    | Keudah      | 2                   | 6                 |
| 8  | Syiah Kuala  | Lamgugob    | 2                   | 10                |
| 9  | Ulee Kareng  | Ulee Kareng | 2                   | 9                 |

Sumber: BPS Kota Banda Aceh 2022.

Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk di Kota Banda Aceh pada tahun 2021, jumlah penduduk Kota Banda Aceh

dari hasil proyeksi yaitu sebesar 270.321 jiwa, yaitu penduduk laki-laki sejumlah 138.993 jiwa dan perempuan sejumlah 131.328 jiwa. Kecamatan Kuta Alam mempunyai jumlah penduduk yang paling besar, yaitu 53.679 jiwa, diikuti Kecamatan Syiah Kuala berjumlah 38.682 jiwa, serta Kecamatan Baiturrahman sebanyak 38.192 jiwa. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh di tahun 2021 adalah 4.405 jiwa setiap 1 km<sup>2</sup>. Kecamatan Baiturrahman mempunyai kepadatan penduduk tertinggi, 8.412 jiwa/km<sup>2</sup>., diikuti Kecamatan Kuta Raja memiliki kepadatan penduduk terendah 2.668 jiwa/km<sup>2</sup>. Penduduk lelaki lebih banyak dari penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh *sex ratio* yaitu untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk asing sesuai izin tinggal terbatas di Kota Banda Aceh 2021 sebanyak 410 orang. Penduduk asing terbanyak berasal dari warga Negara Thailand yaitu 46 orang. Sementara jumlah penduduk asing berdasarkan izin tinggal tetap di Kota Banda Aceh yaitu 1 orang, serta penduduk berasal dari warga Negara Turki (Iradah, dkk, 2020).

Jumlah anggota DPR Kota Banda Aceh sebanyak 30 orang di antaranya terdiri dari 26 orang laki-laki dan 4 perempuan. Terdapat 54 Dinas dalam Pemerintahan Kota Banda Aceh. Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di kota Banda Aceh sebanyak 4.274, terdiri dari 1.422 orang lelaki dan 2.852 orang perempuan. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Banda Aceh menurut Jenis Belanja yaitu sebesar 1.230.051.494 ribu rupiah yang terdiri dari belanja tidak langsung

sebesar 593.324.830,08 ribu rupiah dan belanja langsung sebesar 636.726.664,05 ribu rupiah (Iradah, dkk, 2020).

Aset Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2019 paling banyak difungsikan pada jalan, irigasi, jaringan sebesar 1.519.803.626.779 rupiah. Penerimaan zakat penghasilan pada Baitul Mal tahun 2019 paling banyak pada Mei 2.092.588.138,77 rupiah, zakat perniagaan pada Mei 403.042.462 rupiah, infaq pada bulan Desember sebesar 216.764.611,90 rupiah, sedekah di bulan Juni sebesar 5.230.044,00 rupiah (Iradah, dkk, 2020).

Kota Banda Aceh juga dilengkapi berbagai fasilitas layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Untuk kategori kesehatan, terdapat 13 unit Rumah Sakit (Umum dan Swasta), kemudian 12 unit Puskesmas, 27 unit Puskesmas Pembantu, 22 unit Polindes dan Poskesdes, 96 unit Posyandu, 22 unit Klinik/Balai Kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan Kota Banda Aceh sudah cukup memadai. Tenaga kesehatan masing-masing fasilitas tersebut telah sesuai dengan kualifikasi pendidikan ahli. Fasilitas puskesmas masyarakat menikmati pelayanan kesehatan terdekat di kecamatan masing-masing karena puskesmas berada pada setiap kecamatan di Banda Aceh. Jaminan kesehatan masih banyak dipakai masyarakat Kota Banda Aceh saat berobat ke puskesmas yaitu JKA sebanyak 362.032 orang, Askes sebanyak 163.552 orang, jamkesmas yaitu sebanyak 129.481 orang, JKN sebanyak 46.666 orang, dan umum sebanyak 11.058 orang.

Dilihat dari aspek sosial keagamaan, masyarakat Kota Banda Aceh mayoritas pemeluk agama Islam, namun juga diperkenankan umat penganut agama lain, seperti Kristen, Hindu, Budha dan yang lainnya yang hidup berdampingan dengan Muslim, dengan rincian ialah agama Islam sebanyak 222.582 jiwa, Protestan sebanyak 717 jiwa, Katolik 538 jiwa, Hindu 39 jiwa, dan umat Budha 2755 jiwa. Jumlah fasilitas ibadah dengan rincian Masjid sebanyak 104 unit, Meunasah 91 unit, Mushalla 90 unit, Gereja 4 unit, Kuil 1 unit, dan Klenteng 1 unit (Iradah, dkk, 2020).

Secara eksplisit, visi dan misi pemerintah Kota Banda Aceh tertuang di dalam program pemerintahan. Adapun visi Banda Aceh: *“Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah”*, adapun Misi yaitu:

1. Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah, muamalah dan syiar Islam
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga
3. Meningkatkan pertumbuhan di bidang ekonomi, pariwisata, kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak.

Dari aspek ekonomi, masyarakat Kota Banda Aceh memiliki berbagai jenis mata pencaharian, terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga kontrak dan honorer, pengusaha (pakaian, sepatu dan berbagai jenis usaha lainnya), konvensi atau menjahit dalam skala industri konveksi kecil, sebagai pedagang, dan jenis mata pencarian yang lain.

Menyangkut usaha konveksi atau menjahit, masyarakat Kota Banda Aceh cenderung relatif banyak yang menggelutinya, dengan berbagai bentuk jenis usaha jahit, baik usaha jahit berkelompok dan usaha jahit pribadi atau perorangan. Pada bagian ini, secara khusus dikemukakan dan dianalisis tentang peran pemerintah dalam upaya menyalurkan fasilitas jahit pada kelompok jahit, kemudian bahasan tentang dampak penyaluran fasilitas tersebut, dan efektivitas proses penyaluran fasilitas jahit kepada kelompok jahit.

#### **4.2 Peran dari Pemerintah Banda Aceh Menyalurkan Fasilitas Menjahit ke Kelompok Jahit dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat**

Pada bagian ini secara khusus akan dikemukakan peran serta pemerintah dalam melaksanakan penyaluran fasilitas menjahit bagi kelompok jahit di dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kota Banda Aceh. Kata peran di sini berarti keterlibatan atau perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki seorang individu atau dalam kedudukannya sebagai pemerintah yang memberi pelayanan pada masyarakat. Di dalam konteks ini diarahkan pada peran pemerintah

Kota Banda Aceh dalam menyalurkan fasilitas jahit bagi kelompok jahit di dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kota Banda Aceh khususnya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) punya peran dalam pemberdayaan pelaku usaha industri konveksi atau kelompok jahit. Menurut Ilyas selaku Kepala Bidang Industri Disnaker (Wawancara, 2022), peran pemerintah Kota saat ini berbentuk pemberian alat menjahit, pada umumnya berbentuk mesin jahit. Pelaku usaha dalam bentuk kelompok jahit ini hanya memerlukan peralatan pokok terutama mesin untuk menjahit juga mesin tambahan seperti mesin untuk membuat pinggiran kain, dan yang lainnya. Hal ini selaras dengan keterangan Nurliani, sebagai tenaga penyuluh lapangan, bahwa peran yang pemerintah di dalam memberdayakan masyarakat bagi kelompok jahit, bentuknya ialah pemberian alat menjahit pada pelaku usaha (Nurliani, Wawancara: 2022).

Penulis juga sempat melakukan wawancara dengan beberapa pelaku usaha jahit pada kelompok jahit pada Kecamatan Meuraksa Kota Banda Aceh. Rahman, salah satu penjahit dan pemilik usaha jahit menyebutkan bahwa pemerintah kota sudah melakukan upaya terbaik di berbagai bidang usaha termasuk di bidang konveksi jahit. Ia mengaku sudah mendapatkan peralatan usaha menjahit seperti mesin untuk menjahit dan mesin pinggir (Wawancara, 2022). Pada keterangan lain, Nia (salah satu penjahit) juga mengemukakan hal yang sama seperti berikut:

Peran pemerintah yang telah dilakukan diantaranya berbentuk pemberian mesin jahit baik mesin jahit baju dan mesin pinggirnya.

Adapun untuk peralatan lainnya memang kita yang membeli, seperti benang, jarum jahit, kain, dan perlengkapan lainnya. (Nia, Wawancara: 2021).

Keterangan lainnya juga diperoleh dari Husniati, juga pelaku usaha konveksi menyatakan:

Peran pemerintah bidang pengembangan dan pemberdayaan pengusaha jahit memang tampak pada pemberian mesin jahit. Saya rasa, pemberian bantuan khususnya mesin jahit ini baik bagi pengembangan usaha masyarakat, apalagi masih jahit ini kan memang pokok dan mendasar untuk bidang usaha jahit ini (Husniati, Wawancara: 2021)

Pemberian peralatan dan mesin jahit cukup membantu pelaku usaha dalam meningkatkan pertumbuhan usaha, sekaligus memberi peluang bagi peningkatan pendapatan. Secara konseptual, memberi fasilitas kepada para pelaku usaha termasuk upaya dan peran relatif cukup mampu memberikan kemudahan bagi pelaku usaha di dalam membangun usaha menjadi lebih baik. Secara praktis, memberikan mesin jahit merupakan hal pokok (mendasar) dan penentu di dalam kelanjutan eksistensi usaha konveksi. Untuk itu, pemerintah Kota Banda Aceh relatif *concern* melakukan upaya pemberdayaan dalam bentuk memberikan alat atau mesin jahit kepada pelaku kelompok usaha jahit.

Peran pemerintah Kota Banda Aceh di dalam pemberdayaan masyarakat khusus bidang konveksi cenderung dilaksanakan secara kontinu. Pemberian fasilitas jahit ini mempunyai kriteria tersendiri. Artinya, tidak semua penjahit mendapatkan fasilitas mesin jahit. Di dalam keterangan Nurliani (tenaga penyuluh lapangan), disebutkan bahwa peran pemerintah yang dilaksanakan oleh dinas teknis hanya

dalam bentuk fasilitas mesin. Program pemberian fasilitas tersebut telah terlaksana cukup lama, mulai dari tahun 2017 sampai dengan sekarang (Wawancara, 2022). Hal ini dapat dipahami dalam ulasan berikut ini:

Peran dinas tenaga kerja kota banda aceh hanya menyalurkan fasilitas menjahit tersebut yang disediakan dewan aspirasi. Ini sudah berlangsung dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Bentuk fasilitas menjahit yang diberikan adalah mesin jahit (Nurliani, Wawancara, 2022”.

Adapun pihak-pihak yang memenuhi kriteria dan ketentuan yang mendapatkan fasilitas tersebut adalah:

- a. Bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) meskipun PNS di dalam usaha juga menjadi penjahit atau punya usaha dan atau tempat menjahit.
- b. Penerima fasilitas harus berumur di bawah 64 tahun. Artinya, pelaku dan kelompok usaha jahit yang di atas 64 tahun tidak lagi mendapatkan bantuan fasilitas.
- c. Memiliki usaha jahit kelompok

Peran pemerintah Kota Banda Aceh, yang unsur pelaksana di dalam kegiatan penyaluran dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja tidak hanya memberikan bantuan, namun begitu melakukan pengawasan terhadap kelompok jahit yang sudah diberikan fasilitas jahit. Proses pengawasan ini dilakukan dalam rentang 3 bulan sekali, walaupun dalam surat pengawasan ditetapkan dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sekali (Ilyas, Wawancara 2022). Ini menunjukkan bahwa ada atensi dan keseriusan dari pemerintah dalam memberdayakan usaha jahit bagi kelompok jahit.

Realisasi peran pemerintah tersebut juga telah dipublikasikan oleh beberapa media online, pemerintah kota melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Banda Aceh telah menyerahkan mesin jahit serbaguna, mesin jahit obras dan mesin jahit sirsak untuk pelaku industri kecil dan menengah bidang konveksi atau menjahit yang ada di Kecamatan Meuraxa, Banda Raya dan kecamatan Kuta Raja. Langkah pemberian bantuan ini sebagai upaya mendorong tumbuh kembang perindustrian dan industri kecil menengah yang berfokus pada kelompok usaha jahit (Fitriana, 2022).

Selain dalam bentuk peran pemberian bantuan fasilitas mesin jahit, pemerintah kota juga melakukan pelatihan kepada kelompok jahit per satu tahun sekali. Pelaksanaan pelatihan sekaligus fasilitas jahit ini secara langsung membantu kelompok jahit serta membuka kembali lapangan kerja kepada masyarakat yang memiliki keahlian dan potensi bidang konveksi atau menjahit (Nurliani, Wawancara, 2022). Dalam keterangan Ilyas disebutkan sebagai berikut:

Selain pemberian fasilitas mesin jahit, dinas tenaga kerja juga melakukan pelatihan-pelatihan jahit setiap satu tahun sekali. Akan tetapi beberapa kelompok jahit mengikuti kegiatan jahit BLK (Balai Latihan Kerja). Dampak pelatihan dan pemberian atau penyaluran fasilitas menjahit ini bagi kelompok jahit di kecamatan Meuraxa secara khusus dapat membantu beberapa kelompok jahit dan membuka kembali lapangan kerja (Ilyas, Wawancara, 2022).

Selain dalam bentuk pemberian mesin jahit, pemerintah Kota Banda Aceh berperan di dalam melaksanakan pelatihan-pelatihan. Dalam keterangan Nurlaini (Wawancara, 2022), pelatihan jahit ini dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Program-program pelatihan ini

direncanakan dilakukan kurang dari satu tahun sekali. Hal ini juga diterangkan Devi dan Maryani, masing-masing termasuk kelompok jahit di Kecamatan Meuraxa bahwa pelaksanaan pelatihan ini terus dilakukan untuk memberikan pengalaman kerja serta menciptakan para pengusaha konveksi atau menjahit yang profesional (Devi dan Maryani., Wawancara: 2022). Maryani mengemukakan ulasanya sebagai berikut:

Kegiatan pelatihan dilakukan tiap satu tahun sekali. Kegiatan pelatihan ini bermaksud agar supaya pengusaha menjahit ini memiliki *skill*, dan diharapkan mampu untuk memberi latihan kepada masyarakat yang memiliki minat di bidang ini. Upaya pelatihan ini dilakukan dengan mendatangkan pelatih khusus dari Banda Aceh. Tujuannya semata untuk membekali pelaku usaha agar lebih mumpuni, mengetahui teknik menjahit, serta mematangkan kemampuan menjahit (Maryani, Wawancara., 2022).

Pelatihan atau *practice* adalah bagian yang selalu mempunyai relasi dalam setiap keberhasilan dan kematangan kinerja. Pelatihan juga mempunyai relasi sangat erat dengan aspek manajemen kerja. Karena melalui pelatihan sistem dan pola kerja akan terbangun baik dan positif, dan bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja. Umumnya, pelatihan atau praktis dilakukan agar pengalaman kerja dapat bertambah, di samping untuk memaksimalkan kemampuan di bidang usaha. Begitu juga berlaku dalam usaha kelompok jahit ada di Kecamatan Meuraxa, pelatihan diperlukan untuk membantu para pelaku usaha lebih profesional, dan meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Pelatihan kerja, khususnya menjahit dan teknik-teknik yang diperlukan di dalam menjahit termasuk bagian pengembangan *skill*, mematangkan keahlian bagi orang-orang yang sudah lama bekerja di bidang konveksi atau membekali pengetahuan kerja bagi pelaku usaha yang baru menjajaki bidang konveksi. Wujudnya ialah untuk menambah keahlian, keterampilan yang selanjutnya menjadi aset yang berharga bagi pengembangan usaha. Pelatihan ini juga akan menambah kemampuan kerja pengusaha menjahit. Kegiatan praktis pelatihan tersebut dilakukan untuk mengimbangi peran pemberian bantuan alat menjahit yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Sebab, pelatihan tidak cukup dalam pengembangan usaha, sehingga peran lain yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Banda Aceh adalah dengan memberikan bantuan berupamesin jahit.

Mengacu kepada uraian di atas dapat diketahui bahwa bentuk peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam memberdayakan pelaku usaha kelompok jahit ini terdiri dari tiga kategori, yaitu:

1. Pemberian bantuan mesin jahit
2. Melaksanakan pengawasan atau *controlling*
3. Melakukan pelatihan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun sekali.

Ketiga kategori peran di atas dilaksanakan dalam upaya agar para keompok jahit dapat memaksimalkan kinerja dan membangun usaha menjadi lebih baik. Meskipun begitu, tiga peran di atas masih menyisakan polemik di tengah masyarakat. Di dalam realisasinya, pemberian bantuan mesin jahit khususnya cenderung masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal ini sebagaimana dikemukakan Nia,

merupakan salah satu pengusaha jahit, dan mengakui bahwa mesin jahit yang dibagikan pemerintah Kota Banda Aceh ada yang belum menyentuh para pelaku usaha yang memang membutuhkan. Dalam keterangannya, ia memang mendapatkan bantuan mesin dan pernah juga mengikuti pelatihan, tetapi ia juga mengungkapkan bahwa ada sebagian pelaku usaha menjahit yang memang membutuhkan tidak mendapat bantuan dari pemerintah:

Menurut saya pemberian bantuan mesin jahit ini banyak yang dapat, dan langkah pemerintah semacam ini patut untuk kita apresiasi. Akan tetapi, ada yang tidak tepat sasaran dan nggak merata. Ada yang betul-betul menjahit tidak mendapat mesin jahit, sementara yang tidak serius menjahit dan bahkan tidak memiliki usaha jahit mendapatkan mesin sehingga mesinnya dijual. Ini berdasarkan laporan dari pelaku usaha jahit kepada saya, dan saya juga kenal sama dia (Nia, Wawancara: 2022).

Keterangan di atas menunjukkan bahwa pemberian mesin jahit memang sudah dilakukan, dan menjadi program pemerintahan pada bidang pengembangan UMKM, akan tetapi pada faktualnya, upaya pemberian bantuan tersebut tidak dilaksanakan secara akurat, sebab ada sebagian pengusaha yang tidak mendapatkannya sementara ada juga pihak lain yang bukan berprofesi sebagai penjahit mendapatkn bantuan.

Selain itu, persoalan lainnya adalah tentang pelatihan. Dinas Disnaker yang berada di bawah pemerintah Kota Banda Aceh yang tugasnya memberikan pelatihan kerja menjahit justru hanya kepada para pelaku yang relatif sudah mumpuni dan memang memiliki *skil* menjahit. Pemerintah tidak berusaha untuk memperluas pihak yang mendapat pelatihan secara umum, misalnya pada masyarakat yang

memiliki keinginan untuk menjahit tetapi tidak memiliki fasilitas di dalam membuka usahanya. Ini dipahami dari keterangan Hamdani dan Ar (Wawancara, 2022), bahwa pelatihan hanya dilaksanakan di dalam kuota tertentu, dan tidak semua pihak dapat mengikutinya. Bahkan hanya diperuntukkan terhadap kelompok jahit yang sudah mempunyai tempat usaha jahit. Sementara untuk masyarakat umum justru tidak dibuka peluang untuk dilatih profesi menjahit.

Adapun strategi dari pemerintah Kota Banda Aceh di dalam memberdayakan pelaku usaha UMKM bidang konveksi kelompok jahit juga sangat erat relasinya dengan peran sebelumnya. Hanya saja, strategi lebih mengarah kepada upaya di mana wujud peran sebelumnya dapat dilaksanakan secara baik dan berkesinambungan. Dalam kaitannya dengan bantuan alat menjahit, maka strategi yang dilakukan adalah dengan membuat program pemberian mesin jahit secara periodik dan sifatnya kontinu. Langkah yang dilaksanakan untuk mewujudkan strategi tersebut ialah dengan menentukan siapa saja yang sudah menerima bantuan tidak lagi didata sebagai pihak penerima, sementara jumlah bantuan mesin jahit akan dibagikan ke pihak yang belum mendapatkannya. Kriteria yang mendapat mesin jahit seperti bukan PNS, berumur kurang dari 64 tahun, dan kepada penjahit yang masuk dalam kelompok jahit (Nurlaini., Wawancara: 2022).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa peran dari pemerintah Kota Banda Aceh di dalam memberdayakan kelompok jahit kepada para pelaku usaha bidang konveksi yaitu memberikan

fasilitas mesin jahit, melaksanakan pengawasan terhadap kelompok jahit yang sudah menerima fasilitas, dan melaksanakan pelatihan di dalam rentang waktu 1 tahun sekali. Dalam mewujudkannya, maka pemerintah Kota melakukan strategi dengan langkah-langkah yang tertentu sesuai dengan jenis peran yang dilakukan. Untuk bantuan alat mesin jahit, strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan pencatatan dan pendataan terhadap para pelaku usaha yang belum maupun yang sudah menerima bantuan jahit. Menetapkan kriteria-kriteria kepada kelompok jahit yang dapat menerima fasilitas jahit.

#### **4.3 Dampak Penyaluran Fasilitas Menjahit kepada Kelompok Jahit di Kota Banda Aceh**

Program-program primer yang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi idealnya harus mampu mencapai tujuan. Bagaimana pun, keberadaan peran pemerintah menjadi sangat penting dalam semua aspek, termasuk bidang pemberdayaan masyarakat kelompok jahit. Pemberian dan penyaluran fasilitas menjahit kepada kelompok jahit di Kota Banda Aceh secara langsung memunculkan dampak positif. Menurut Ir. Ilyas (Kepala Bidang Industri Disnaker) dan Nurliani Amd (Tenaga Penyuluh Lapangan), dampak langsung yang mampu diwujudkan pada penyaluran fasilitas menjahit ini ialah membantu beberapa kelompok menjahit dan membuka kembali lapangan kerja bagi masyarakat yang memiliki keahlian di bidang menjahit (Hasil Wawancara, 2022). Dalam keterangan Ilyas disebutkan:

Salah satu upaya dan maksud pemerintah memberikan mesin fasilitas menjahit kepada kelompok jahit ini adalah agar dapat membantuk kelompok jahit yang masih kekurangan fasilitas, khususnya mesin jahit. Bagi kelompok jahit yang telah punya fasilitas menjahit yang lengkap, maka penyalurannya itu agar membuka lapangan kerja. Kelompok usaha jahit tentu dapat merekrut kembali masyarakat yang mempunyai keahlian dan potensi menjahit (Ilyas, Wawancara: 2022).

Keterangan berikutnya dikemukakan oleh Nia, penjahit pada salah satu kelompok jahit di Kecamatan Meuraxa:

Pemberian fasilitas menjahit kepada kami selaku kelompok usaha jahit ini tentu sangat membantu. Ada mesin-mesin jahit yang sudah rusak dapat membantu dengan adanya penyaluran fasilitas mesin. Mesin jahit menjadi alat penting dan harganya relatif mahal. Kalau untuk benang jarum dan alat lainnya bisa kami usahakan, tetapi kalau mesin jahit memang agak sulit karena harganya. Untuk itu pemberian fasilitas mesin ini bagi saya sangat membantu (Wawancara, 2022).

Pelaksanaan program penyaluran fasilitas menjahit oleh dinas terkait dasarnya dilaksanakan sebagai upaya merespon kebutuhan di tengah masyarakat. Kota Banda Aceh yang relatif cukup banyak membidangi usaha menjahit, dengan adanya bantuan tersebut dapat membantu kelompok jahit. Tidak hanya itu penyaluran fasilitas di dalam jumlah yang besar juga akan membuka lapangan kerja. Bagi kelompok jahit yang memiliki fasilitas yang lengkap tentu memberi langkah dan peluang tersendiri untuk merekrut masyarakat yang di dalam kesehariannya tidak memiliki pekerjaan tetap, sementara dia punya keahlian dalam menjahit. Oleh sebab itu langkah pemerintah bukan hanya memberi fasilitas, tetapi juga memberikan pelatihan 1

tahun sekali. Pelatihan ini secara langsung mampu menambah *skill* bagi masyarakat yang baru ikut dalam kelompok jahit.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam pelaksanaan program penyaluran fasilitas jahit, mempunyai dampak secara langsung dalam dua hal, yaitu membantu kelompok jahit dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Kedua dampak ini bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat.

#### **4.4 Efektivitas Penyaluran Fasilitas Menjahit di dalam Kaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat di Banda Aceh**

Efektivitas erat kaitannya dengan seberapa besar pelaksanaan suatu program dapat mencapai tujuan. Pada pembahasan terdahulu, khususnya di bab dua telah dikemukakan bahwa efektivitas adalah bagian penting dalam mengukur kerja, pelayanan, ataupun program yang dilaksanakan suatu lembaga. Dalam menentukan apakah suatu program telah efektif dilaksanakan atau tidak, memerlukan indikator tersendiri. Dalam pembahasan ini, mengukur efektivitas penyaluran fasilitas menjahit dalam kaitan dengan pemberdayaan masyarakat di Kota Banda Aceh juga sangat ditentukan dengan terpenuhi atau tidaknya indikator yang digunakan. Indikator yang digunakan pada pembahasan ini terdapat empat indikator sebagaimana telah diulas di dalam kerangka penelitian pada bab terdahulu, yaitu ketepatan sasaran, sosialisai program, tujuan program, pemantauan program.

##### **1. Ketepatan sasaran**

Ketepatan sasaran bermaksud bahwa program yang diberikan atau dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh menyalurkan fasilitas menjahit kepada kelompok jahit di dalam memberdayakan masyarakat. Kaitan dengan indikator ini, bahwa kelompok jahit di kota Banda Aceh belum atau tidak semuanya mendapatkan fasilitas mesin jahit. Menurut Nia, seorang penjahit pada kelompok jahit di Kecamatan Meuraxa menyatakan bahwa pemberian bantuan mesin jahit masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Mesin jahit disalurkan pemerintah kota belum menyentuh semua kelompok jahit baik bagi kelompok jahit yang besar maupun kelompok jahit yang masih kecil atau baru membuka koneksi jahit. Ia mengakui bahwa meskipun kelompok jahit yang ia tangani telah mendapat bantuan dan upaya pelatihan, namun ada beberapa kelompok jahit lainnya yang belum mendapatkan bantuan, padahal sangat membutuhkan (Wawancara, 2022).

Suatu program dapat dikatakan sudah efektif bila memenuhi semua indikator yang menjadi alat ukur efektivitas secara kumulatif atau keseluruhan. Salah satunya adalah ketepatan sasaran. Sasaran pemberian dan penyaluran fasilitas jahit idealnya harus terpenuhi dengan baik. Karena, tidak semua kelompok jahit memiliki fasilitas mesin jahit yang baik, atau bahkan ada yang rusak. Ini dipahami di dalam beberapa keterangan informan terdahulu, bahwa penyaluran fasilitas mesin ini disamping sebagai upaya membukakan lapangan kerja, juga untuk membantu pelaku usaha kelompok jahit pada saat

fasilitas yang ada telah mengalami kerusakan, atau keberfungsianya tidak lagi baik.

## 2. Sosialisai program

Sosialisasi program adalah salah satu bagian penting di dalam pelaksanaan perogram itu sendiri. Sebab, sosialisasi program dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang maksud serta tujuan program itu dilaksanakan. Hubungannya dengan indikator efektivitas penyaluran fasilitas jahit bagi kelompok jahit yang ada di Kota Banda Aceh, sosialisasi juga tidak dilakukan. Hal ini dapat dipahami dari keterangan beberapa penjahit misalnya Nia, Maryani dan Devi. Mereka tidak mengetahui adanya pemberitahuan tentang adanya penyaluran bantuan. Namun, mereka baru mengetahui pada saat kelompok jahit mereka telah diberikan bantuan, dan pihak dari pemerintah yang diwakili Dinas Tenaga Kerja memberitahukannya justru pada beberapa hari sebelum penyaluran itu dilakukan (Hasil Wawancara, 2022).

Sosialisasi program kerja pemerintah idealnya memang harus dilakukan jauh-jauh hari, hal ini dilaksanakan agar semua kelompok jahit jauh-jauh hari dapat mempersiapkan pelaksanaan program itu, dan mungkin dapat memberikan masukan-masukan kepada pihak pemerintah. Gunanya agar program yang dibentuk itu dilaksanakan secara tepat guna, tepat sasaran, dan maksimal dilakukan.

## 3. Tujuan program

Tujuan program juga menjadi salah satu indikator kumulatif dari efektivitas. Program pemerintah terhadap pemberian berbagai

bentuk fasilitas kepada masyarakat diawali dengan perencanaan, di dalamnya juga ditetapkan adanya tujuan-tujuan yang hendak akan dicapai. Pada konteks ini, tujuan program penyaluran fasilitas jahit sudah terpenuhi. Dalam keterangan Ilyas dan Nurlaini sebelumnya, dapat dipahami bahwa program penyaluran fasilitas jahit tersebut di dalam pelaksanaannya memiliki tujuan untuk membantu kelompok jahit dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang mempunyai keahlian di bidang menjahit (Hasil Wawancara., 2022).

Tujuan-tujuan yang dikemukakan pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja di atas juga telah dikonfirmasi oleh beberapa penjahit bahwa pemnyaluran bantuan tersebut memberi kemudahan, khusus membantu penyediaan mesin menjahit kepada kelompok jahit yang memerlukannya.

#### 4. Pemantauan program

Indikator efektivitas yang keempat adalah pemantauan kerja atau pengawasan perogram. Dalam konteks ini, penyaluran fasilitas menjahit bagi kelompok jahit dilakukan upaya pengawasan. Hal ini dilakukan agar fasilitas yang digunakan itu sedapat mungkin untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, tidak dijual atau digunakan untuk keperluan lain selain menunjang tujuan program pemerintah Kota Banda Aceh.

Pembahasan sebelumnya telah dikemukakan, selain bentuk pernyaluran fasilitas, pemerintah juga melakukan pengawasan pada kelompok jahit yang sudah menerima bantuan mesin. Pengawasan ini bagian dari sinergitas dan kelangsungan program agar memberi

dan mencapai tujuan program tersebut, yaitu digunakan secara baik untuk menunjang kegiatan usaha menjahit.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tidak semua indikator efektivitas yang dapat terpenuhi pada pelaksanaan penyaluran fasilitas jahit pada kelompok jahit oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Berdasarkan empat indikator yang ada yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan atau pengawasan program, hanya ada 2 indikator yang terpenuhi yaitu, tujuan program dan pemantauan program, sementara ketepatan dan sosialisasi program cenderung masih belum terlaksana dengan baik. Atas dasar itu, dapat disimpulkan bahwa penyaluran fasilitas jahit kepada kelompok jahit di dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Banda Aceh belum efektif dilakukan.

Empat indikator efektivitas yang menjadi ukuran efektif dan tidaknya penyaluran fasilitas jahit di atas bersifat kumulatif, bukan alternatif. Hal ini bermakna bahwa semua indikator tersebut harus dipenuhi. Jika satu saja indikator tersebut tidak ada, maka program penyaluran fasilitas dapat dikatakan tidak efektif. Atas dasar itu, di dalam proses penyaluran fasilitas jahit oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sebelumnya dapat dikatakan belum terlaksana dengan efektif dan belum maksimal.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, bisa ditarik tiga kesimpulan yang sesuai permasalahan yang telah diajukan, yaitu sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Banda Aceh menyalurkan fasilitas menjahit pada kelompok jahit dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu memberikan dan menyerahkan fasilitas mesin jahit, melaksanakan pengawasan terhadap kelompok jahit yang menerima fasilitas jahit agar dipergunakan secara baik dan tidak dijual, terakhir adalah melaksanakan pelatihan pada setiap 1 tahun sekali.
2. Dampak penyaluran fasilitas jahit kepada kelompok jahit dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Banda Aceh yaitu berdampak positif, terutama dapat membantu kelompok jahit yang memiliki keterbatasan dan kerusakan mesin jahit, dan berdampak kepada terbukanya lapangan kerja, khususnya penyaluran fasilitas jahit kepada kelompok jahit yang memerlukan penambahan fasilitas mesin, dan dapat merekrut masyarakat yang mempunyai potensi dan keahlian dalam menjahit.
3. Efektivitas penyaluran fasilitas menjahit kepada kelompok jahit dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Banda Aceh dilihat di dalam empat indikator, yaitu ketepatan sasaran sebuah program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.

Dari empat indikator ini, hanya ada dua indikator yang dipenuhi yaitu tujuan dan pemantauan atau pengawasan program. Adapun ketepatan sasaran dan sosialisasi program belum dipenuhi secara baik. Untuk itu, penyaluran fasilitas jahit tersebut belum efektif dilaksanakan.

## 5.2 Saran

Mengacu kepada temuan penelitian sebelumnya, maka dapat dinyatakan beberapa saran sebagai rekomendasi penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat terutama kelompok jahit yang belum mendapat bantuan penyaluran fasilitas perlu mengajukan bantuan tertulis kepada pihak pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja, bertujuan agar pemerintah Kota Banda Aceh mengetahui kelompok jahit yang belum menerima penyaluran fasilitas mesin jahit.
2. Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, perlu melakukan sosialisasi program kepada masyarakat, selanjutnya menyalurkan fasilitas jahit secara tepat guna, kemudian memperhatikan masyarakat yang memiliki keinginan dan keahlian dalam menjahit agar bisa difasilitasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annas, A. (2017). *Interaksi Pengambilan Keputusan, Evaluasi Kebijakan*. Sulawesi: Celebes Media Perkasa.
- Antonio, MS. (2007). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Manajemen Keuangan Anwar, M. (2019). *Dasar-Dasar Manajemen Perusahaan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arindya, R. (2019). *Efektivitas Organisasi*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Aryani, R. (2013). "Potensi Usaha Penjahit Pakaian di dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Ekonomi Islam Studi Kasus Penjahit Pakaian Di Kec. Kuok". Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim.
- Baihaqi, dan Syardiansah. (2019). "Efektifitas Pemberian Modal Usaha Bergulir DP3AKB pada Kelompok Usaha Perempuan Miskin di Kab Aceh Timur". Jurnal: "Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis", Vol, 10, No, 2.
- Busro, M. (2018). *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Echols, JM., & Shadily, H. (1992). *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fauzan, M., dan Siagian, B. (2017). *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fuad, M., Christin, H., Nurlela., Sugiarto., & Paulus. (2006). *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gobel, LV. (2015). "Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial Kepada Kelompok Usaha Bersama Di Kecamatan Bolaang

*Mongondow Selatan". Jurnal: "Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo". Vol. II, Nomor 2.*

Iradah, Muhammad Iqbal., dkk., (2020). *Banda Aceh dalam Angka 2020, Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Banda Aceh.*

Jubilee. (2010). *20 Bisnis IT dari Hobi Menjadi Rejeki.* Jakarta: Elex Media Komputindo.

Kasmir. (2009). *Pengantar Manajemen Keuangan.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Musfah, J. (2018). *Manajemen Pendidikan: Aplikasi, Strategi dan Inovasi.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Putriningsih, DAW, dan Jember, I.M. (2018). *Efektivitas dan Dampak Program Bantuan Kelompok Usaha Bersama (Kube) terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Sasaran Kab Gianyar.* Jurnal: *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*". Vol. 7, No. 3.

Rochaety, E., & Tresnanti, R. (2005). *Kamus Istilah Ekonomi* Jakarta: Bumi Aksara.

Sa'adah, N. (2020). *Efektifitas Penyaluran Modal Usaha Mesin Jahit Terhadap Pendapatan Amanda Taylor Gampong Peunayong Kota Banda Aceh.*

Sa'adah, N. (2020). *Efektivitas Penyaluran Modal usaha Mesin Jahiti Terhadap Pendapatan Amanda Taylor Gampong Penayong Kota Banda Aceh.* Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Sabri, & Susanti, M. (2021). *Kewirausahaan: Pemanfaatan Limbah Pelepah Kelapa Sawit dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat Desa.* Kota Bandung: Media Sains Indonesia.

Saputra, M.I. (2022). *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil & Menengah (Umkh) Industri Konveksi Kota Meulaboh*. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Sarifudin, M. (2021). *Pembiayaan Musyawarah dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BPRS*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.

Sholihin, A.I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soetrisno, E. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta Kencana Prenada Media Group.

Sopannah, dkk. (2021). *Bunga Rampai Ekonomi dan Bisnis: Isu Kontemporer Ekonomi dan Bisnis*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Sufi, Rusdi, dkk., (1997) *Sejarah Kota Madya Banda Aceh, Banda Aceh*: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1997.

Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta.

Suprihatiningsih. (2020). *Prakarya & Kewirausahaan Tata Busana di Madrasah Aliyah: Pengenalan dan Praktik Penggunaan Alat Jahit Mesin dan Manual*. Yogyakarta: Deepublish.

Tangkilisan, H.N.S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Gra Media Widiasarana Indonesia.

Tim Redaksi. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia-KBI*, Jakarta: Pusat Bahasa.

Vinda, K, dan Ma'ruf, M.F. (2017). *"Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat dlm Kelompok Usaha Bersama: Studi Kasus Pada Pemberian Bantuan Mesin*

*Jahit Kelompok Usaha Bersama Bunga Sejahtera Desa  
Ngampungan Kec. Bareng Kab. Jombang".*

